

## "A Guide To Theory": Epistemologi Politik Luar Negeri

Oleh : I.G. Wahyu Wicaksana<sup>1</sup>

### Abstract

*The paper describes some concepts and theories outlining foreign policy analysis. It starts by showing the significance of foreign policy subject in International Relations study. Afterward it summarizes the development of foreign policy concepts and theories. Eventually it describes some challenges to foreign policy subject concerning with the global transformation. As a conclusion it tries to prescribe the global and strategic approaches to the contemporary foreign policy.*

Keywords: foreign policy, epistemology, global and strategic approach.

### Pendahuluan

Kajian mengenai politik luar negeri agaknya tetap akan menjadi salah satu esensi disiplin Ilmu Hubungan Internasional. Pernyataan di atas mempunyai dukungan teoritis maupun empiris yang cukup kuat. Secara teoritis, ditinjau dari evolusi disiplin Ilmu Hubungan Internasionaional selama 70 tahun terakhir, memperlihatkan adanya dominasi cara pandang Realisme. Dunia hubungan internasional menurut Realisme adalah arena interaksi antar aktor yang terutama ialah aktor negara-bangsa (*nation-state*). Interaksi yang pada umumnya digambarkan bergerak di dalam pola-pola yang cenderung kooperatif di satu sisi dan masa tertentu maupun konflikatif di sisi dan masa yang lain, ternyata dilakukan dengan instrumen disebut politik luar negeri tadi (Amstutz.1995). Cara pandang dengan pengutamaan analisis perilaku politik luar negeri aktor-aktor negara-bangsa sering pula dikenal dengan *state-centric model*. Hubungan internasional dikonstruksi sebagai hubungan timbal balik antar politik luar negeri demi memperjuangkan tujuan nasional masing-masing negara-bangsa (bisa dibaca misalnya pada karya Coulumbus dan Wolfe. 1999).

Pada tataran empiris, asumsi-asumsi Realisme yang *state-centric* mendapat semacam konfirmasi atau pun verifikasi. Dalam rentang waktu yang sama yakni kira-kira 70 tahun terakhir, dinamika hubungan internasional digerakan oleh perilaku politik luar negeri khususnya negara bangsa-negara bangsa besar. Sebutlah beberapa peristiwa monumental yang mempengaruhi tata dunia seperti; Perang Dunia I dan II, Perang Dingin, berdirinya PBB, Perang Teluk, dan era pasca Perang Dingin sekarang ini. Aksi dan interaksi politik luar negeri Amerika Serikat (AS), Uni Soviet (sekarang Rusia), Inggris, China, dan yang lainnya senantiasa menjadi faktor maupun konsekuensi di balik peristiwa-peristiwa tersebut. Bukti lainnya misalkan, bila dicermati pemberitaan pelbagai media massa mengenai perkembangan masalah-masalah internasional (*internasional affairs*), porsi pemberitaan tentang kebijakan luar negeri AS, sengketa nuklir antar negara, KTT para pemimpin dunia, biasanya besar dan menjadi berita utama. Hal ini menunjukkan popularitas aktor negara-bangsa dengan politik luar negerinya tetap tinggi.

Sekalipun demikian, perlu diakui bahwa realitas hubungan internasional begitu dinamis dan kompleks. Di satu sisi dominasi kebenaran epistemologi Realisme yang didukung fenomena empiris politik internasional memang sulit disangkal. Akan tetapi hadirnya berbagai kecenderungan baru hubungan internasional terkini, juga membutuhkan respon yang tepat dari para pengkaji politik luar

---

<sup>1</sup> Pengajar pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga, Surabaya.

negeri. Apalagi jika mereka yang konservatif dengan *state-centric model*-nya. Secara epistemologis atau dalam konteks bagaimana memperoleh pengetahuan yang sistematis dan saintifik mengenai politik luar negeri, elaborasi perspektif dan pendekatan/metode analisis mutlak perlu dilakukan agar salah satu esensi disiplin Ilmu Hubungan Internasional ini selalu relevan dan signifikan.

Untuk itu tulisan ini bertujuan mencoba merekomendasikan suatu preskripsi epistemologis politik luar negeri yang sekiranya akan memiliki validitas dan reliabilitas sebagai kerangka analisis fenomena hubungan internasional terkini, Penulis mencanangkannya sebagai suatu pendekatan/kerangka analisis global strategis. Secara garis besar tulisan ini membahas; *Pertama*, aneka ragam epistemologis politik luar negeri disertai analisis kekuatan serta kelemahannya masing-masing. *Kedua*, berangkat dari paparan tentang kekuatan dan kelemahan epistemologis yang ada, diusulkan sebuah gagasan awal suatu pendekatan global strategis dimaksud.

### **Menganalisis Politik Luar Negeri**

Upaya para sarjana Ilmu Hubungan Internasional yang berusaha mendeskripsikan dan menjelaskan politik luar negeri secara ilmiah, menghasilkan epistemologi politik luar negeri yang dapat dibagi menjadi dua, yakni; *Pertama*, menganalisis dan mendeskripsikan politik luar negeri menurut gejala-gejala umum yang menunjukkan pola perilaku politik luar negeri, sifat maupun jenis politik luar negeri berdasarkan konteks proses serta tujuan perumusannya. *Kedua*, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan (*decision making process*) politik luar negeri. Kedua epistemologi ini telah menghasilkan sejumlah konsep dan teori tentang politik luar negeri dengan tingkat generalisasi dari yang terbatas pada studi kasus sampai dengan tingkat generalisasi universal.

Dalam mempelajari politik luar negeri, ada sebuah diktum yang berlaku universal berbunyi politik luar negeri selalu dilandasi oleh kepentingan nasional demi mencapai tujuan-tujuan nasional negara-bangsanya. Tujuan nasional sebenarnya merupakan elaborasi kepentingan-kepentingan nasional negara bangsa tersebut (Morgenthau.1997). Dalil universal ini menunjukkan hubungan tidak terpisahkan antara politik luar negeri sebagai alat/instrumen interaksi negara bangsa dalam politik internasional selalu didorong dan dikendalikan oleh motivasi mencapai kepentingan nasional tertentu. Hubungan ini berlaku dalam tataran konseptual maupun empiris.

Konsep politik luar negeri dan kepentingan nasional telah dianut dan digunakan sebagai dua konsep yang saling terkait. Berbagai kalangan seperti akademisi, jurnalis, birokrat, dan juga politisi menyebutkan serta menggunakan konsep politik luar negeri dan kepentingan nasional untuk berbagai tujuan serta konteks. Tetapi ironisnya bila ditanyakan kepada mereka apakah makna sesungguhnya dari politik luar negeri dan kepentingan nasional tersebut, jawaban yang beraneka ragam-lah yang muncul menanggapi. Pada kenyataannya tidak ada suatu konsensus universal menyangkut definisi konseptual politik luar negeri dan kepentingan nasional. Setiap akademisi, jurnalis, birokrat dan juga politisi memiliki interpretasi masing-masing yang barangkali dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan serta psikologis mereka. Hal ini menyebabkan politik luar negeri dan kepentingan nasional cenderung difahami sebagai terminologi umum yang merujuk pada sejumlah atribut yang sering pula kurang konsisten. Padahal dalam rangka mengembangkan epistemologi yang sahih, pendefinisian secara konseptual terhadap gejala sosial tertentu sangatlah penting artinya. Setidaknya melalui konseptualisasi yang tepat, memadai, komunikatif, akan dapat membantu dalam rangka tataran operasionalisasi agar bisa dinilai/ diukur secara akurat.

Kesulitan dalam mendefinisikan politik luar negeri disebabkan antara lain karena ketidakjelasan bentuk ataupun wujud politik luar negeri tersebut. Menurut beberapa ilmuwan politik dan hubungan

internasional, berangkat dari ketidakjelasan bentuk ataupun wujud dimaksud, maka sudah seharusnya perdebatan tiada akhir soal definisi dikesampingkan saja. Mereka muncul dengan sebuah cara pandang yang longgar dan luas, dalam hal ini politik luar negeri mencakup sejumlah mekanisme dan proses yang dilakukan oleh suatu sistem politik nasional guna menanggapi dinamika perubahan lingkungan eksternal dimana tujuan-tujuannya hendak diperjuangkan (Misalnya dirangkum oleh Mas'ood.1989).

Definisi di atas mendeskripsikan politik luar negeri memiliki setidaknya tiga elemen dasar; 1) mekanisme dan sistem, 2) lingkungan eksternal yang selalu dinamis, 3) tujuan yang mau diraih, adanya ketiga elemen ini merupakan gambaran yang lazim ditemukan pada pendefinisian konsep keputusan politik. Asumsi yang diberlakukan untuk politik luar negeri ialah menyamakannya dengan keputusan politik atau kebijakan nasional pada umumnya. Hanya bedanya terletak pada penekanan keputusan atau kebijakan politik luar negeri berorientasi keluar yurisdiksi negara yakni kepada aktor-aktor hubungan internasional yang lain. Definisi ini mengandaikan politik luar negeri seperti instrumen untuk berinteraksi di fora internasional.

Terdapat satu aspek yang masih lemah bila decermati pada definisi di atas. Elemen respon atau tanggapan dari suatu sistem politik nasional, masih menyimpan beberapa ketidakjelasan di dalamnya. Seperti apakah respon yang dimaksudkan? Beberapa pendapat menyatakan bahwa respon bisa saja meliputi aksi, reaksi militer, sikap diplomatik tertentu, ide atau gagasan, doktrin/ideologi, tindakan-tindakan persuasif dan kooperatif, strategi non blok, dan lain sebagainya sejauh semuanya berkonteks nasional yang orientasinya ke luar negeri (Holsti.1998).

Dengan demikian pendefinisian politik luar negeri tidak memperlihatkan spesifikasi bentuk/wujudnya. Persoalan ini akan membawa masalah manakala menganalisis proses perumusannya. Berpijak dari bentuk atau wujud yang mungkin sekali juga diproses melalui melibatkan banyak faktor termasuk kondisi psikologis pemimpin nasional, daya intelektualitas aktor yang terlibat, sikap dan tindakan politik yang tersamar, motivasi-motivasi individual serta kelompok, yang seluruhnya bersifat multipretatif.

Kaum Behavioralis/Positivis agaknya sangat menyadari kesulitan-kesulitan dalam mengidentifikasi wujud respon serta proses perumusan politik luar negeri. Namun, mereka berupaya menghindari keterjerbakan pada aneka tafsir yang spekulatif. Sebagai jalan keluarnya para Behavioralis/Positivis bermain-main konsep dan teori tentang politik luar negeri melalui pengamatan terhadap pola, struktur, dan proses yang terukur.

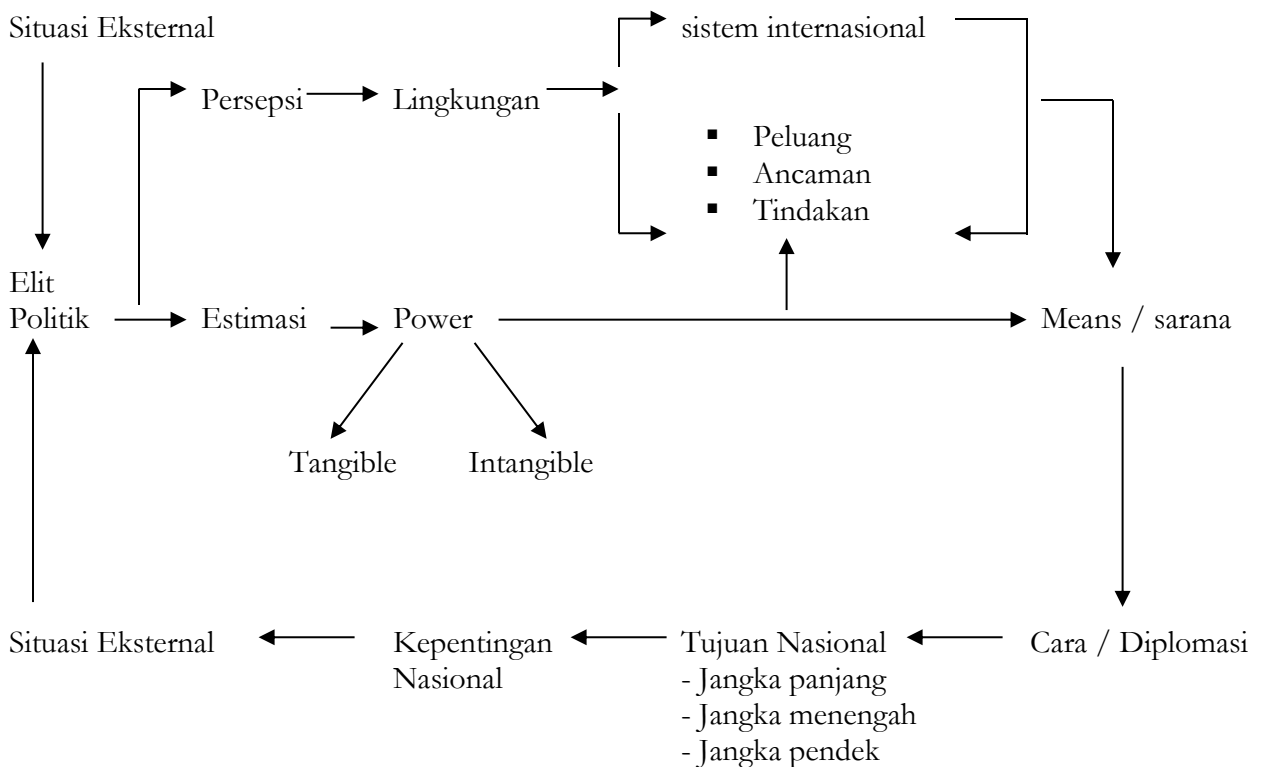
*Pertama*, politik luar negeri dikatakan memenuhi syarat suatu kebijakan apabila telah mencakup tiga unsur yakni; 1) ide/gagasan, doktrin tentang tujuan-tujuan nasional yang akan dicapai, 2) terdapat sumber data (*resources*) yang mampu mendukung pencapaian tujuan, dan 3) memiliki strategi guna memobilisasi sumber daya untuk meraih tujuan (Letzner.1974). Ketiga syarat ini merupakan elemen-elemen dasar yang secara empiris memungkinkan operasionalisasi konsep politik luar negeri melalui pengamatan yang obyektif atas dokumen kenegaraan, pernyataan para pejabat pembuat keputusan (*decision maker*), dan tindakan para diplomat

*Kedua*, politik luar negeri sebagai aksi ataupun reaksi dilukiskan ke dalam dua pola *inside out* dan *outside in*. Pola *inside out* dilakukan oleh aktor-aktor dengan kekuatan nasional (*national power*) besar dalam rangka menciptakan, mengontrol, bahkan mengubah tata (*order*) internasional. Sedangkan pola *outside in* menunjukkan reaksi atau respon negara-bangsa yang cenderung harus mengadaptasi perubahan-perubahan dunia luarnya. Pola *inside out* lebih bersifat agresif ofensif, sementara pola *outside in*

tampak lebih defensif saja (McClelland.1986). Penggambaran pola-pola politik luar negeri baik *inside out* maupun *outside in* didasarkan observasi yang bersifat general terhadap perilaku kekuatan-kekuatan besar, menengah, dan kecil dalam politik internasional. Studi deskriptif McClelland sangat bermanfaat dalam menerangkan kecenderungan-kecenderungan orientasi politik luar negeri suatu negara bangsa khususnya bila dihubungkan dengan pengaruh kekuatan regional dan global tertentu.

*Ketiga*, politik luar negeri juga bisa dikategorisasi menurut tujuan pembuatannya, 1) kebijakan programatik maksudnya adalah politik luar negeri yang dirancang secara komprehensif melalui observasi mendetail seluruh faktor yang berpengaruh karena bertujuan luas dalam jangka panjang, 2) kebijakan krisis artinya suatu keputusan yang diambil dalam situasi genting, sehingga tidak direncanakan sebelumnya. Ada aspek pendadakan dan spekulasi. 3) kebijakan politik dalam tataran operasionalisasi kebijakan programatik yang dalam pelaksanaannya bisa dire-evaluasi, direvisi, dan dibatalkan setiap saat diperlukan (Dalam Dougherty & Platzgraf. Ir. 1986). Konseptualisasi ini dapat digunakan untuk menganalisis jenis tindakan serta dasar pengambilan kebijakan politik luar negeri pemerintah suatu negara bangsa dalam kurun waktu dan situasi yang berbeda-beda.

*Keempat*, proses perumusan politik luar negeri merupakan jalinan yang rumit dan kompleks. Proses itu melibatkan perilaku elit politik, situasi lingkungan internal dan eksternal, persepsi terhadap lingkungan, estimasi kekuatan nasional, tujuan nasional, dan cara-cara diplomasi. Rangkaian prosesnya dapat desederhanakan sebagaimana tampak dalam diagram berikut ini :



Beberapa model lain seperti model sistem, pembuatan keputusan model rasional, pendekatan alternatif model irasional, hingga yang disebut-sebut pendekatan komprehensif (*comprehensive approach*), juga dikembangkan dengan elemen-elemen dasar mirip skema di atas (Lovel. 1970 & Rosenau. 1980)

*Kelima*, penggambaran dan penjelasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi, menjadi determinan proses pembuatan keputusan politik luar negeri yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Sebagaimana telah diungkapkan di depan, pendefinisian serta perumusan kepentingan nasional sangat menentukan keputusan politik luar negeri. Sebagaimana telah diungkapkan juga bahwa layaknya politik luar negeri, konsep kepentingan nasional juga sulit untuk didefinisikan. umumnya konsep kepentingan nasional dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan vital yang menentukan kelangsungan hidup suatu negara-bangsa. Karenanya kepentingan nasional bersifat urgen dan strategis (Plano & Olten 1990).

Masih cukup abstrak batasan-batasan yang ditawarkan oleh definisi di atas. Kesulitan muncul dari persoalan-persoalan seperti apakah kepentingan nasional itu berlaku universal. Dalam artian sama bagi semua aktor negara-bangsa. Selanjutnya adakah pengertian yang disepakati bahwa kebutuhan vital yang dimaksud telah benar-benar menrasional. Sebab pada kenyataannya perumusan kepentingan nasional bernuansa elitis. Dan yang terakhir sampai berapa lamakah suatu kepentingan nasional memiliki urgensi, dengan kata lain apakah kepentingan nasional itu dinamis?

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan demikian para penstudi hubungan internasional mengusulkan suatu klasifikasi kepentingan nasional berdasarkan tingkat prioritas, bidang isu, lingkup ruang dan waktu (Rourke.1989). Kepentingan-kepentingan seperti keamanan nasional, kesejahteraan nasional, kebanggaan bangsa, dan perlindungan warga negara dikelompokkan menurut kategori kepentingan primer, kepentingan sekunder, kepentingan permanen, kepentingan variabel, kepentingan skala luas, dan kepentingan terbatas. Klasifikasi ini menentukan bagaimana suatu negara-bangsa memberikan respon terhadap lingkungannya dalam bentuk politik luar negeri. Semakin urgen kepentingan nasional yang diperjuangkan, maka semakin ketat dan intensif pula politik luar negeri yang dijalankan. Keamanan nasional biasanya ditempatkan sebagai prioritas utama, sementara kepentingan-kepentingan lain menjadi prioritas berikutnya. Klasifikasi lain mengibaratkan adanya kepentingan-kepentingan nasional yang muncul dalam interaksi antarnegara-bangsa, yakni berupa kepentingan yang saling identik, saling konfliktif, dan saling komplementer. Harmoni atau disharmoni politik luar negeri antarnegara-bangsa dipengaruhi oleh sifat kepentingan mereka yang berinteraksi (Rosenau. 1969).

*Keenam*, metode eksplanasi faktor-faktor yang mempengaruhi diambilnya suatu keputusan politik luar negeri melalui level analisis dengan menentukan terlebih dahulu unit analisis atau variabel dependen dan variabel independen atau unit eksplanasi. Eksplanasi yang dibuat dalam bentuk korelasi antarvariabel dependen dengan variabel independen. Masing-masing variabel dipilah menurut level/peringkat tertentu. Tingkat yang ada bervariasi dari yang hanya dua yakni level negara-bangsa dan sistem internasional, sampai stratifikasi yang lebih rumit misalnya level analisis yang bertingkat dari individu, negara-bangsa, sistem internasional. Elaborasi juga bisa dilakukan dengan memilah level analisis menjadi lima tingkatan individu, kelompok individu, kelompok negara-bangsa, dan sistemik (Dipaparkan secara rinci oleh Waltz. 1971).

Penetapan level analisis cukup bermanfaat guna mendesain kerangka analisis yang spesifik dan terfokus. Biasanya eksplanasi dibuat dengan menggabungkan satu level analisis dengan level analisis yang lain. Kelemahan mendasar metode ini, ibarat kue lapis, lapisan yang bertingkat-tingkat

menjadikan fenomena yang teramati tampak parsial. Demi kepentingan komprehensivitas analisis, semua level bisa dipakai bersamaan, akan tetapi dalam praktiknya sangat merepotkan.

*Ketujuh* mempelajari politik luar negeri melalui studi perbandingan (comparative study of foreign policy). Perbandingan dilakukan antara politik Negara bangsa satu dengan yang lainnya. Baik secara umum ataupun mengkhusus pada rezim-rezim pemerintahan tertentu. Dapat pula dibuat perbandingan politik luar negeri antarrezim yang berbeda dalam suatu negara bangsa. Adapun tujuan melakukan perbandingan meliputi: 1) mendapatkan karakteristik yang khas dari politik negara bangsa tertentu. 2) identifikasi persamaan ataupun perbedaan pola implementasi, proses perumusan termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan analisis evaluasi efektivitas kebijakan dan strategi. 3) perbandingan juga digunakan untuk mengembangkan teori-teori umum politik luar negeri. (Groom & Light. Eds. 1994).

Di tengah realitas hubungan internasional yang sarat kecenderungan baru, apakah epistemologi-epistemologi Behavioralis/Positivis masih relevan dalam menganalisis politik luar negeri? Jawaban pertanyaan di atas sekaligus memperlihatkan kelemahan-kelemahannya epistemologi yang ada bila digunakan menganalisis fenomena politik luar negeri di tengah perubahan global saat ini.

*Pertama*, analisis politik luar negeri cenderung kaku karena sifatnya yang elitis dan *state-centric*, padahal dewasa ini perkembangan peran yang dimainkan aktor-aktor non negara-bangsa semakin signifikan.

*Kedua*, analisis tentang faktor-faktor kepentingan nasional yang terlalu memberi prioritas pada agenda keamanan nasional (*high-politics-issue*) tidak akan cukup memuaskan lagi apabila diketengahkan tanpa memperhatikan dengan serius perkembangan agenda-agenda lain yang berpolitik, berdimensi sosiologis, kultural, ekonomis, dan lain sebagainya (*low politics-issue*)

*Ketiga*, diversifikasi aktor dan isu global terkini yang bertambah signifikasinya membawa implikasi yaitu hubungan internasional menjadi semakin kompleks di mana proses transformasi kehidupan masyarakat berlangsung mengglobal (Held & McGrew. 2004). Dalam konteks ini tentu akan kesulitan bila level analisis digunakan sebagai alat bantu analisis.

Oleh karena itu diperlukan sebuah kerangka analisis yang mampu mengakomodasi dua kebutuhan berikut; *Pertama*, menampilkan cara pandang yang berwawasan global, menjadi wadah yang interdisipliner sehingga mampu memotret dengan jelas fenomena politik luar negeri di era global saat ini. *Kedua*, tidak semata-mata global, pendekatannya pun harus terjangkarkan yakni berkemampuan membidik aspek-aspek strategis dalam dinamika global tersebut.

### **Preskripsi Awal Untuk Global Strategis**

Pendapat Margot Light (dalam Groom & Light. Eds 1994:1993) sangat menarik dalam menggambarkan bagaimana arti penting studi mengenai politik luar negeri yang harus subyeknya dengan beragam agenda global yang terus berkembang. Light mulai dengan menyatakan bahwa analisis politik luar negeri yang populer disebut *foreign policy analysis* (FPA) merupakan kajian yang mengkoneksikan atau menjembatani tema-tema internasional yang bermacam-macam, serta menterjemahkan isu-isu yang abstrak menjadi masalah-masalah yang kongkret. Studi mengenai politik luar negeri menghubungkan sistem politik domestik suatu negara bangsa dengan sistem politik antar negara bangsa. Hal ini merelasikan tingkat analisis dari yang mikro dengan level makro. Akhirnya studi tentang politik luar negeri menjadikan Ilmu Hubungan Internasional berlangsung interdisipliner berama disiplin-disiplin ilmu sosial yang lain. Para peneliti politik luar negeri menurut

Light harus bisa menerima pengaruh-pengaruh misalnya dari ekonomi politik internasional, organisasi internasional, dan transnasionalisme yang selama ini dianggap unit analisis utama.

Argumen Light diatas dapat dijadikan pijakan yang sesuai untuk mengembangkan pendekatan global yang strategis sebagai epistemologi politik luar negeri. *Pertama*, dalam mempelajari politik luar negeri perlu memperhatikan implikasi-implikasi isu global seperti HAM, lingkungan, terorisme, ketimpangan, migrasi, energi, etnisitas, dan kosmopolitanisme terhadap perumusan keputusan politik luar negeri. Isu-isu global dideskripsikan sebagai sesuatu yang melintasi perbatasan strata level-level analisis yang selama ini memisahkan pengaruh dan implikasi tindakan individu, kelompok elit, negara bangsa autonom, kelompok negara bangsa, dan sistemik. Isu-isu global tersebut berpengaruh terhadap dan muncul dalam semua level analisis sehingga pembatasan-pembatasan hierarkis.

*Kedua*, pendekatan global perlu dicermati secara strategis. Memandang politik luar negeri yang erat bersinggungan dengan isu-isu global cenderung mendorong para analisis untuk terjebak pada perdebatan diskursus-diskursus global, sehingga pandangannya terbawa arus wacana dan tidak terjangkarkan. Oleh sebab itulah diperlukan sudut pandang yang menjadi titik acuan. Dalam hal ini setiap analisis politik luar negeri mendasarkan perspektifnya-perspektifnya pada kepentingan-kepentingan nasional yang strategis. Sebagai contoh seorang analisis politik luar negeri Indonesia mendasarkan perspektifnya pada arti penting suatu isu global bagi kepentingan nasional Indonesia yang berdampak luas dan menentukan bagi Bangsa Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Amstutz, Mark R.(1995). *International Conflict and Cooperation: An Introduction to World Politics*. Dubuque: Brown and Benchmark Publisher.
- Coulombus, Theodore A & James.H.Wolfe.1(999). *Introduction to International Relation: Power and Justice*. New Delhi. Prentice Hall.
- Dougherty, James E & Robert L. Platzgraf. Jr.(1986). *Contending Theories of International Relation : A Comprehensive survey*. New York. Longman.
- Groom, A.I.R. dan Margot Light. eds. (1994). *Contemporary International Relations: A Guide To Theory*. London and New York. Pinter Publisher.
- Held, David and Anthony McGrew. eds. (2004). *Global Transformation Reader: An Introduction to Globalization Debate*. Oxford. Blackwell. Publisher, Ltd.
- Holsti, K.J. (1988). *International Politics: Framework For Analysis*. New Jersey. Prentice Hall.
- Letzner, Howard. (1974). *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach*. Ohio, Bill and Howell Co.
- Lovel, John P. (1970). *Foreign Policy In Perspective: Strategy, Adaptation and Decision Making*. New York. Holt, Rineh Art and Winston, Inc.
- Mas’oed, Mohtar. (1989). *Studi Hubungan Internasional: Kerangka Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta. PAU-UGM.

I.G.Wahyu Wicaksana, "A Guide to Theory": Epistemologi Politik Luar Negeri". *Global dan Strategis*, Th I, No. 1, Januari 2007, 12-19.

McClelland, Charles. (1986). *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem*. Bandung. C.V. Rajawali.

Morgan, Patrick M. (1987). *Theories and Approach to International Politics: What Are We To Thing*. New Brunswick, Transaction Book.

Morganthau, Hans J. (1977). *Politics Among Nation*. New York. McGrown-Hill.

Plano, Jack C. & Ray Olten. (1990). *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung. Aburdin.

Rosenau, James N. (1969). *International Politics and Foreign Policy: A Reader In Research and Theory*. New York. The Free Press.

Rosenau, James N. (1980). *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York. The Free Press.

Waltz, Kenneth. (1971). *The Theory of International Politics*. Boston. Addison Wesley.